BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Republik Indonesia.¹

Pengertian Desa sangat beragam, artinya sangat tergantung dari sudut mana melihat desa. Perspektif geografi misalnya, desa dimaknai sebagai tempat atau daerah dimana penduduk berkumpul dan hidup bersama dan mereka dapat menggunakan lingkungan setempat untuk mempertahankan, melangsungkan dan mengembangkan kehidupannya.²

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

² Didik Sukriono, **Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa**, Setara Press, Malang, 2010 hlm 61-62

B. Kajian Umum Tentang Kepala Desa

1. Pengertian Kepala Desa

Pemerintahan diartikan sebagai keseluruhan ruang lingkup jabatan dalam suatu organisasi negara, pemerintahan sebagai lingkungan jabatan adalah alat-alat kelengkapan negara seperti jabatan eksekutif, jabatan legislative, jabatan yudikatif dan jabatan supra struktur lainnya dalam suatu pemerintahan yang berlaku. Pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintah desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.³

“Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”⁴

Kepala Desa berkedudukan sebagai alat pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Kepala Desa bukan saja menjalankan pemerintahan, membina ketertiban dan ketentraman melainkan menjaga hukum yang dilanggar dapat dipulihkan seperti sedia kala.⁵ Pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah

³ Maria Eni, **Pemerintah Desa dan Implementasinya**, Erlangga, Jakarta, 2006, hal 23

⁴ Ketentuan Umum pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

⁵ Yasen, **Revolusi dari Desa**, PT Elax Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2014, hlm 8

desa .⁶ Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
⁷Pemerintahan desa sebagaimana yang diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.⁸

2. Tugas dan Wewenang Kepala Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa juga mengatur tugas dan kewajian Kepala Desa , adapun tugas dan kewenangan Kepala Desa tersebut sebagai berikut :⁹

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa ;
- b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa ;
- c) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa ;
- d) Menerapkan peraturan Desa ;

⁶ Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

⁷ Ibid , Pasal 1 angka 2

⁸ Ibid , Pasal 25

⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- e) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- f) Membina kehidupan masyarakat Desa ;
- g) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa ;
- h) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa ;
- i) Mengembangkan sumber pendapatan desa ;
- j) Mengusulkan dan menerima pelimpahan kesejahteraan masyarakat Desa ;
- k) Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat Desa
- l) Memanfaatkan teknologi tepat guna ;
- m) Mengoordinasi pembangunan Desa secara partisipatif ;
- n) Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjukkan kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

o) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .¹⁰

3. Tugas Kepala Desa Dalam Administasi Atau Manajerial

Tugas administrasi atau Manajerial adalah tugas yang dilakukan Kepala Daerah dalam merencanakan, mengorganisir, menggerakkan, mengarahkan dan mengendalikan, serta mengawasi jalannya organisasi ke arah pencapaian tujuan Tugas tersebut meliputi koordinasi atas kegiatan instansi-instansi vertical dengan dinas-dinas daerah mengusahakan terus menerus agar semua peraturan perundang-undangan dan pemerintahan daerah dijalankan oleh instansi pemerintahan serta pejabat-pejabat yang ditugaskan untuk itu dan mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, serta melaksanakan segala tugas pemerintahan yang diberikan kepadanya.¹¹

4. Kewajiban Kepala Desa

Dalam suatu tugas dan kewenangan Kepala desa terdapat Kewajiban yang harus dijalankan, kewajiban Kepala Desa terdapat pada Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagai berikut :¹²

¹⁰ Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

¹¹ Kaloh, **Kepemimpinan Kepaka Daerah**, sinar grafika, Jakarta 2009, hlm 49

¹² Pasal 26 ayat 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- a) Memegang utuh dan mengamalkan Pancasila , melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia , dan Bhinneka Tunggal Ika ;¹³
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;¹⁴
- c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa ;¹⁵
- d) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan ;¹⁶
- e) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender ;¹⁷
- f) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang Akuntabel , transparan , professional , efektif dan efisien , bersih , serta bebas dari kolusi , korupsi , dan nepotisme :¹⁸
- g) Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa ;¹⁹
- h) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik ;²⁰

¹³ Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid

¹⁹ Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

- i) Mengelola keuangan dan aset Desa ²¹
- j) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa ;²²
- k) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa ;²³
- l) Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa ;²⁴
- m) Membina dan melestarikan nilai social budaya masyarakat Desa ;²⁵
- n) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa ;²⁶
- o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup ²⁷
- p) Memberikan informasi kepadal masyarakat Desa .²⁸

²⁰ Ibid
²¹ Ibid
²² Ibid
²³ Ibid
²⁴ Ibid
²⁵ Ibid
²⁶ Ibid
²⁷ Ibid
²⁸ Ibid

C. Kajian Umum Tentang Administrasi

Administrasi dalam arti sempit berarti segala kegiatan tertulis, catat-mencatat, surat-menyusut, ketik-mengetik serta penyimpanan dan pengurusan masalah-masalah yang hanya bersifat teknis ketatausahaan belaka.²⁹ Berdasarkan pengertian yang sempit ini maka pengertian administrasi itu sama dengan pengertian tata usaha; sehingga pengertian tata usaha itupun sama dengan pengertian administrasi dalam arti sempit, dengan demikian kegiatan tata usaha itu hanyalah sebagian dari kegiatan administrasi.³⁰

Administrasi dalam arti luas, kata administrasi dari Bahasa Inggris "*administration*" yang berarti "to serve" atau melayani. Leonard D.White dalam bukunya "*introduction on the study of public administration*" mendefinisikan administrasi sebagai suatu proses yang umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, negara atau swasta sipil atau militer, usaha yang besar atau yang kecil.³¹ Sedangkan H.A.Simon didalam bukunya "*public administration*" mendefinisikan administrasi Negara sebagai kegiatan dari sekelompok manusia mengadakan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama.³²

²⁹ Marbun, **Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara**, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm 6

³⁰ Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

³¹ Soewarno Handyaningrat. **Pengantar Study Ilmu Administrasi dan Management**, gunung agung, Jakarta, 1980, hlm 2

³² Op Cit. Soewarno handyaningrat. **Pengantar Study Ilmu Administrasi dan Management**

D. Kajian Umum Tentang Administrasi Kependudukan

1. Pengertian Administrasi Kependudukan

Administrasi kependudukan sebagai suatu system diharapkan dapat diselenggarakan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi Negara. Dari segi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administrative, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan , tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.³³

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia pengertian administrasi kependudukan memiliki beberapa pengertian, yaitu pertama; usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi; kedua, usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan serta mencapai tujuan ; ketiga, yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah; keempat, kegiatan kantor dan tata usaha.³⁴

“Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penelitian dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public dan pembangunan sektor lain”³⁵

³³ Ibid

³⁴ Rolando Tamawiji, **Kinerja Pemerintahan Desa Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Desa Poopo Barat Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan**, (online) , <https://media.neliti.com/media/publications/1103-ID-kinerja-pemerintah-desa-dalam-pelayanan-administrasi-kependudukan-di-desa-poopo.pdf> diakses 1 oktober 2017

³⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

1. Bentuk Administrasi Kependudukan

a. Kartu Keluarga

Kartu keluarga , selanjutnya disingkat KK , adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama ,susunan dan hubungan dalam keluarga ,serta identitas anggota keluarga .³⁶

b. Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Kartu tanda penduduk Elektronik , selanjutnya disingkat KTP-EI , adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti dari yang diterbitkan oleh instansi pelaksanaan .³⁷

2. Fungsi Administarsi Kependudukan

Secara umum adminitrasi kependudukan memiliki 2 fungsi yaitu :

a. Fungsi Hukum

Memberikan kepastian hukum,menjamin keadilan dan memberikan kesejahteraan penduduk sesuai dengan martabat kemanusiaan.Dokumen yang menyangkut dengan kependudukan khususnya Kratu Tanda Penduduk yang memang harus dimiliki

³⁶ Pasal 1 angka 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

³⁷ Ibid , Pasal 1 angka 14

oleh masyarakat agar bisa memperoleh kepastian hukum dalam melakukan suatu tindakan yang berhubungan dengan hukum.

b. Fungsi Registrasi

Memberikan pengakuan dan pengesahan status perdata seseorang dan membentuk data mikro bagi proses pembangunan guna perumusan kebijakan-kebijakan yang berwawas kependudukan. Dokumen kependudukan khususnya Kartu Tanda Penduduk juga mempunyai fungsi registrasi yang bertujuan untuk pengesahan status keperdataan seseorang

E. Kajian Umum Tentang Asas Tugas Pembantuan

a. Pengertian Asas Tugas Pembantuan

“Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/ Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi”³⁸

F. Kajian Umum Tentang Sosialisasi

Sosialisasi diartikan sebagai sebuah proses seumur hidup bagaimana seseorang individu mempelajari kebiasaan-kebiasaan yang meliputi cara-cara hidup, nilai-nilai, dan norma-norma sosial

³⁸ Pasal 1 angka 11 **Undang-undang Republik Indonesia** Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

yang terdapat dalam masyarakat agar dapat diterima oleh masyarakat .³⁹ Beberapa pengertian sosialisasi menurut para ahli :

a. Charlotte Buhler

Sosialisasi adalah proses yang membantu individu-individu belajar dan menyesuaikan diri , bagaimana cara hidup , dan berpikir kelompoknya agar dapat berperan dan berfungsi dengan kelompoknya .⁴⁰

b. Peter Berger

Sosialisasi adalah suatu proses dimana seseorang menghayati serta memahami norma-norma dalam masyarakat tempat tinggalnya sehingga akan membentuk kepribadiannya.

c. Soerjono Soekanto

Sosialisasi adalah proses mengkomunikasikan kebudayaan kepada warga masyarakat sekitarnya .⁴¹

Sosialisasi dapat dikatakan suatu proses paling penting yang secara dasar atau tidak selalu dijalani setiap harinya. Sosialisasi sendiri dapat diartikan sebagai sebuah proses pengenalan nilai-nilai yang sedemikian rupa sehingga akhirnya terbentuk suatu individu yang utuh. Proses sosialisasi menurut Mead dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut :

³⁹ Shadily Hasan ,1993, **Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia**, PT Rineka Cipta, Jakarta hlm 20

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Ibid

a. Tahap persiapan (*Preparatory stage*)

Tahapan ini dialami sejak manusia lahir dan dimiliki oleh setiap individu yang berbeda-beda.

b. Tahapan Menipu (*Play stage*)

Tahapan ini ditandai dengan seseorang meniru pelan-pelan yang dilakukan oleh orang dewasa. Meniru apa yang dilihat, dilakukan, dan didengar menggunakan panca indra seorang balita.

c. Tahap siap bertindak (*Game stage*)

Pada tahapan peniruan yang dilakukan mulai berkurangnya dan digantikan oleh peran yang secara langsung dimainkan.

d. Tahap penerimaan norma kolektif (*Generalized stage*)

Pada tahapan ini seseorang telah dianggap dewasa dan telah menjadi warga masyarakat sepenuhnya.

Sosialisasi memiliki beberapa tipe, menurut Berger dan Luckman agar sosialisasi dapat berjalan dengan baik, tertib dan berlangsung terus menerus maka terdapat dua tipe sosialisasi yaitu :

- a. Sosialisasi formal, sosialisasi ini terbentuk melalui lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dan masyarakat yang memiliki tugas khusus dalam mensosialisasikan nilai, norma dan peraturan-peraturan yang harus dipelajari oleh masyarakat.

- b. Sosialisasi informal, sosialisasi ini terdapat dalam pergaulan sehari-hari yang bersifat kekeluargaan. Dalam hal ini dapat dilakukan dimana saja sesuai dengan kegiatan sehari-hari.⁴²

⁴² Shadily Hasan ,1993, **Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia**, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 25